

BAB 2

PENATAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN PADA MASA ORDE BARU

Gerakan mahasiswa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, bukanlah gerakan mahasiswa yang pertama kali terjadi di Indonesia sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Pada tahun 1966 telah terjadi gerakan mahasiswa yang besar dan berhasil menumbangkan pemerintah Demokrasi Terpimpin. Bahkan sejak awal kekuasaan Orde Baru, di tahun 1970-an, mahasiswa sudah melakukan aksi-aksinya lagi menentang pemerintah. Gerakan mahasiswa terus berlanjut di bawah tekanan keras pemerintah Orde Baru. Gerakan mahasiswa baru mengendur setelah dikeluarkan berbagai kebijakan penataan organisasi kemahasiswaan yang mematikan kekritisn mahasiswa terutama dalam pengungkapan pendapat mereka secara terbuka.

Bagian ini akan membahas beberapa hal tentang kebijakan pemerintah terhadap dunia kemahasiswaan, khususnya yang terkait dengan penataan lembaga kemahasiswaan. Masing-masing bagian akan menguraikan apa yang mendorong dikeluarkannya kebijakan, ketentuan yang ditetapkan, pengorganisasian, dan dampak yang dirasakan oleh mahasiswa. Untuk melihat kebijakan pemerintah itu, maka terlebih dahulu akan dibahas secara singkat periodisasi gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1966, 1974, 1978, dan pasca 1978 sampai 1990. Penyajian seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami hubungan antara gerakan mahasiswa dengan sikap yang diambil oleh pemerintah.

2.1 Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru: Sebuah Tinjauan Singkat dari Tahun 1966 – 1990

2.1.1 Gerakan Mahasiswa 1966

Gerakan mahasiswa di Indonesia sebagai aksi kolektif atau gerakan massa, muncul pertama kalinya pada tahun 1966. Gerakan 1966 merupakan gerakan yang menumbangkan pemerintahan Demokrasi

Terpimpin pimpinan Soekarno dan menaikkan Orde Baru pimpinan Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Pada awal terbentuknya Orde Baru, mahasiswa merupakan sekutu Angkatan Darat dalam proses transisi kekuasaan politik nasional. Implementasi strategi Angkatan Darat guna menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) diwujudkan dengan merangkul aktivis mahasiswa anti-komunis ke dalam pengaruh mereka dan berdirilah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Mahasiswa anti-komunis ini juga tengah menghadapi masalah akibat agresivitas organ-organ prokomunis atau pro-Soekarno seperti Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Kesamaan *common enemy* (musuh bersama) yaitu PKI inilah yang kemudian memperlancar terjalannya aliansi taktis Angkatan Darat dengan KAMI.¹⁶

Namun, Angkatan Darat tidak akan mudah mengkooptasi organ-organ mahasiswa jika momentum juga tidak tersedia. Devaluasi mata uang asing, membungahnya harga bahan pokok dan bahan bakar, kenaikan tarif transportasi, langka dan mahal nya buku-buku teks, *kesemrawutan* suasana belajar, tentu turut membangun kesadaran mahasiswa untuk melakukan berbagai protes terhadap pemerintah.

Gerakan mahasiswa 1966 diawali dengan aksi protes yang masih sangat kecil dan terbatas. Diawali dengan sejumlah demonstran, kurang lebih 75 orang dan dengan tema utama mengutuk PKI, mahasiswa mulai melakukan gerakannya; aksi tersebut dimulai tanggal 5 Oktober 1965. Sejak saat itu hampir tiap hari diadakan unjuk rasa secara besar-besaran yang melontarkan pembubaran PKI dan penurunan harga kebutuhan pokok. Pada saat itu, gerakan mahasiswa belum memiliki jaringan nasional yang terorganisasi dengan rapi.¹⁷

¹⁶ Francois Railon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966 – 1974*, Penerjemah Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1985., hlm. 13.

¹⁷ Abdul Mun'im DZ, "Gerakan Mahasiswa 1966 di Tengah Pertarungan Politik Elit", dalam Muridan Widjodjo, *op.cit.*, hlm. 28.

Pasca penemuan jenazah para perwira Angkatan Darat di sumur tua Lubang Buaya, Mayor Jenderal Syarif Thayeb (Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan) mengumpulkan tokoh-tokoh organisasi mahasiswa anti-komunis di rumahnya tanggal 25 Oktober 1965. Thayeb kemudian mengusulkan dibentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan usul ini disetujui oleh para tokoh mahasiswa.¹⁸ Berdirinya KAMI mereduksi signifikansi peran PPMI,¹⁹ persatuan mahasiswa terdahulu yang ditinggalkan organ-organ mahasiswa pembentuknya akibat banyak anasir komunis yang masuk ke sana. Anasir komunis yang paling berpengaruh adalah CGMI, yang bersama-sama dengan GMNI, GERMINDO, dan PERHIMI, aktif melakukan manuver politik anti-imprealis Barat di tubuh PPMI.²⁰

Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, yang di dalamnya termasuk organisasi mahasiswa intra kampus yaitu Dewan Mahasiswa, dengan didukung oleh Angkatan Darat kerap melakukan aksi unjuk rasa memprotes pemerintahan Soekarno. Mereka mengusung tuntutan yang dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat): Bubarkan PKI, Rombak Kabinet Dwikora, dan Turunkan Harga. Selain aksi unjuk rasa besar-besaran, mahasiswa juga melakukan aksi mogok kuliah. Protes-protes mahasiswa ini mulai surut saat konsolidasi awal

¹⁸ Organisasi yang secara struktural masuk ke dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) adalah organisasi berazas keagamaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (GKMI), dan organisasi non agama seperti Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Mahasiswa Lokal (SOMAL), Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMASI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemos), dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).

¹⁹ Penserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai penyeimbang BKPRI yang dipengaruhi aktivis pro Sjahrir dan Chairul Saleh, dibentuk setelah diadakan Konferensi Mahasiswa Indonesia tanggal 8 – 10 Maret 1947 di Malang. Kongres ini diikuti oleh HMI, PMKI, dan PMKRI (sebagai organisasi yang berazaskan agama) serta empat organisasi berlandaskan aspek regional, yang terdiri atas Perhimpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan (PMKH) Bogor, Perhimpunan Mahasiswa Djakarta (PMD), Perhimpunan Mahasiswa Djogjakarta (PMJ), dan Masyarakat Mahasiswa Malang (MMM). Hasil dari konferensi ini adalah terbentuknya Penserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), sebuah organisasi federasi aktivis mahasiswa ekstra kampus. Dalam konferensi tersebut, organisasi PMKRI secara formal belum ada dan organisasi yang hadir adalah embrionya, sebab PMKRI baru berdiri tanggal 5 Februari 1947. Lihat Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan: Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta: INSIST Press, 1999., hlm. 99-100.

²⁰ Ridwan Saidi, "Perjuangan KAMI Perjuangan Kaum Muda", dalam Ridwan Saidi, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Jakarta: Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, 1989., hlm. 84.

peralihan kekuasaan politik nasional dari Soekarno ke Soeharto, yang ditandai dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dan di sisi lain dengan dibubarkannya PKI.²¹

Setelah aksi massa itu, sebagai sekutu Angkatan Darat yang dianggap *loyal*, beberapa tokoh mahasiswa kemudian diintegrasikan ke dalam struktur politik pusat. Tokoh-tokoh KAMI seperti Fahmi Idris, Cosmas Batubara, Johny Simandjuntak, David Napitupulu, Mari'e Muhammad, Liem Bian Koen, Soengeng Soerjadi, Nono Anwar Makarim, Yozer Anwar, ditarik masuk ke parlemen.²² Akan tetapi, masuknya sejumlah aktivis ke parlemen mengundang kritik dari sesama mereka. Rahman Tolleng yang secara ideologis dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menyatakan bahwa mereka “sudah menjadi politisi-politisi *tulen*, bukan lagi intelegensia yang berjiwa bebas dan merdeka.”²³

Meskipun mengkritik, Rahman Tolleng pun akhirnya masuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) bersama-sama dengan Hatta Mustafa, Slamet Sukirnantono, Harijadi Darmawan, Cosmas Batubara, Nono Makarim, Johnny Simanjuntak, David Napitupulu, dan beberapa tokoh KAMI lainnya, melalui perombakan struktur parlemen bulan Februari 1968.²⁴ Sementara sisi lain, keberadaan KAMI berangsur-angsur surut dan ini dapat dipahami sebab dasar pembentukannya sekadar aliansi taktis untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan Soekarno dan perlawanan terhadap komunis.

2.1.2 Gerakan Mahasiswa 1974 (Peristiwa Malari)

Hubungan harmonis mahasiswa-militer (pemerintah) tidak berlangsung lama. Paling tidak sejak tahun 1971, aksi-aksi kritik terhadap penyelenggara baru negara mulai dilancarkan, terutama oleh generasi baru

²¹ Lihat Cula, Adi Suryadi. *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Seketsa Gerakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908 – 1998)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999., hlm. 47 – 65.

²² Francois Railon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966 – 1974*, Penerjemah Nasir Tamara, Jakarta: LP3ES, 1985., hlm. 60.

²³ *Ibid.*, hlm. 60. Namun, Tolleng ini pun akhirnya masuk ke dalam parlemen, segera setelah ia terpilih sebagai Ketua Presidium KAMI Pusat di Jakarta menggantikan Yozer Anwar.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

mahasiswa. Fokus kritik bukan ditujukan terhadap personalitas kekuasaan melainkan strategi pembangunan yang diambil.²⁵ Pada bulan Oktober 1973, misalnya, para mahasiswa mengadakan aksi di gedung MPR/DPR untuk menyampaikan “Petisi 24 Oktober”. Isi petisi tersebut adalah kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok yang kaya.²⁶

Protes kembali muncul ketika Ibu Tien Soeharto mengusulkan pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tahun 1973. Pembangunan TMII menurut mahasiswa tidak sesuai dengan situasi Indonesia. Pada waktu itu beberapa gerakan yang muncul mengatasnamakan Gerakan Penghemat, Gerakan Akal Sehat (GAS), dan Gerakan Penyelamat Uang Rakyat (GEPUR). Dalam aksinya, para aktivis mahasiswa anti-Taman Mini melakukan protes dengan mendatangi Kantor Proyek Taman Mini di Matraman Raya, Jakarta. Kedatangan mahasiswa ini dihadang oleh aparat bersenjata dan bentrokan pun tidak terhindarkan.²⁷

Pada tahun 1974, ketegangan hubungan pemerintah dengan mahasiswa sudah tidak dapat dihindari. Berawal pada malam tahun baru 1974, mahasiswa UI mengadakan apel keprihatinan tengah malam. Mereka berkumpul dan berkoordinasi sambil mendengarkan orasi Ketua Dema UI, Hariman Siregar, yang pada malam itu berpidato berapa-api membakar semangat massa mahasiswa agar peduli dengan nasib rakyat. Mereka menyebut malam itu sebagai “Malam Keprihatinan”.²⁸

²⁵ Petisi yang dibuat oleh Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia di Kalibata merupakan salah satu proses yang menjadi tahapan Peristiwa Malari 1974. Lihat pledoi pembelaan Hariman Siregar dalam Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta: Mantika Media Utama, 1994., hlm. 42.

²⁶ Budiman Sudjatmiko, “Gerakan Mahasiswa Kini”, *Kompas* 20 Desember 2000.

²⁷ Rum Aly, *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004., hlm. 172

²⁸ Lihat Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti: Sketsa Sejarah Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908 – 1998)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999. Lihat pula dalam pidato umum Hariman Siregar yang berjudul *Hati Nurani Seorang Demonstran* (Jakarta: Mantika Media Utama, 1994), hlm. 1-8. Hal serupa juga bisa dilihat A. Ariobima Nusantara et.al., *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998., hlm. 8.

Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1974, mahasiswa melakukan peringatan Hari Ulang Tahun Tritura dengan menggelar aksi demonstrasi menggugat pemborosan dalam pembangunan dan menolak modal asing Jepang. Menurut mereka, Jepang dianggap telah merusak Indonesia. Protes mahasiswa kian memanas ketika PM (Perdana Menteri) Jepang, Kakuei Tanaka, berkunjung ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974. Kedatangan Tanaka disambut dengan aksi demonstrasi mahasiswa di lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Isu yang diusung mahasiswa adalah menolak ketergantungan pada modal asing, terutama modal Jepang, karena dinilai sangat merugikan perekonomian nasional.²⁹

Aksi mahasiswa tak terbendung. Puncaknya, tanggal 15 Januari 1974 yang berujung pada peristiwa Malari (malapetaka lima belas Januari). Saat itu, Presiden dan Kabinet Pembangunan II sedang bertemu dan berunding dengan PM Tanaka beserta rombongan di Istana Negara. Menyambut pertemuan itu, mahasiswa menggelar protes dengan berkumpul secara besar-besaran di tempat-tempat strategis. Konsentrasi mahasiswa di Salemba berjumlah sekitar 1.500 orang, namun ketika mereka berjalan menuju Monas semakin banyak. Sekitar 5.000 berkumpul di Trisakti, juga di Glodok dalam jumlah yang sama, sementara lainnya berada di kawasan Senen dengan jumlah sekitar 6.000.³⁰

Aksi demonstrasi mahasiswa pun tak terbendung, dan akibatnya tak terduga karena situasi menjadi berubah dengan ikut berbaurnya massa yang tersebar di jalan-jalan ibukota. Ketika itu, mahasiswa berpawai dari kampus UI Salemba ke kampus Trisakti, sementara pada saat yang bersamaan berlangsung pula kerusuhan akibat aksi massa di berbagai penjuru ibukota Jakarta. Gerakan mahasiswa telah disusupi, dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak jelas identitasnya sehingga

²⁹ *Ibid.*, hlm. 85-86. Lihat pula M. Tohir Effendi, *Oposisi di Indonesia: Studi Kasus Kelompok Petisi 50*, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 1989, hlm. 149. Menurut Tohir, sebelumnya, pada akhir Desember 1973, mahasiswa diwakili seratus orang utusan Dewan Mahasiswa telah mencoba menemui Soeharto di Istana Negara dan Cendana namun gagal, bahkan sebagai penggaantinya mereka juga mencari Sekretaris Negara Soedomo (saat itu) tetapi juga gagal.

³⁰ Adi Suryadi Cula, *op.cit.*, hlm. 87

menimbulkan kerusuhan yang disertai pengrusakan dan pembakaran oleh massa.³¹

Massa membakar kendaraan-kendaraan bermotor terutama buatan Jepang, toko-toko dan kantor-kantor, serta pusat-pusat bisnis. Tercatat 11 nyawa menjadi korban, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, 775 orang ditahan, 807 mobil dan 187 motor dibakar, serta 160 kilogram emas dijarah. Bangunan dan gedung yang dirusak dan dibakar di antaranya Gedung Toyota Astra Motor, Pertamina, Coca Cola, dan ratusan pertokoan di Proyek Senen, serta 144 gedung atau bangunan lainnya hangus dan porak poranda.³² Maka pada hari itu terjadilah malapetaka yang tentu saja di luar perhitungan mahasiswa. Ali Murtopo, salah seorang asisten pribadi Presiden Soeharto, menyebut kejadian tersebut sebagai “Peristiwa Malari” dan menuding mahasiswa sebagai penyebabnya.

Hasil dari gerakan mahasiswa 1974 ternyata sangat pahit bagi keberadaan gerakan mahasiswa selanjutnya. Pada tahun ini pula, sebagai reaksi pemerintah terhadap terjadinya Malari, pemerintah mengeluarkan SK No. 028/U/1974. Inti dari diberlakukannya SK ini adalah pembungkaman suara kritis mahasiswa dengan membatasi aktivitasnya. Sejak saat itu, mahasiswa dalam melakukan kegiatan di kampus harus melalui izin rektor atau otonomi lembaga kemahasiswaan intra-universitas dicabut.

2.1.3 Gerakan Mahasiswa 1977 – 1978

Pada tahun 1977 – 1978, gerakan mahasiswa mulai bergolak lagi. Pada sisi vertikal, suhu politik Indonesia mulai dinamis menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1977 dan pemilihan presiden 1978. Sementara pada sisi horizontal, di Jakarta terjadi kenaikan tarif bus kota, di Surabaya terjadi penggusuran pedagang kaki lima, dan di Bogor terjadi banyak penguasaan tanah masyarakat oleh pejabat. Seperti juga gerakan

³¹ *Ibid*, hlm. 86-87.

³² Anthony Z Abidin, Dedy N. Hidayat, Ikrar N. Bhkti, *Mahar: Pejuang, Pendidik, dan Pendidik Pejuang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997., hlm. 162. Kronologis kejadian lebih lengkap dapat dilihat juga dalam tulisan Hariman Siregar, *Hati Nurani Seorang Demonstran*, Jakarta: Mantika Media Utama, 1994.

mahasiswa tahun 1974, gerakan 1977/1978 ini tidak memiliki satu organisasi sebagai wadah pemersatu para mahasiswa se-Indonesia. Selain masing-masing Dema bergerak melakukan aksinya, mereka juga mengadakan pertemuan-pertemuan antar-mereka dalam rangka menggalang kekompakan yang biasanya menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi-aksinya.

Berbagai tuntutan dilontarkan para mahasiswa dalam gerakan 1977/1978. Mulai dari tuntutan yang sifatnya lokal seperti penyelesaian masalah kelaparan sampai tuntutan yang sifatnya nasional seperti demokratisasi di Indonesia, penyelenggaraan Sidang Istimewa (SI) MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang dianggap menyelewengkan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Akan tetapi, tuntutan yang paling mengemuka pada gerakan mahasiswa 1977/1978 mencapai puncaknya terkait gugatan mereka terhadap kepemimpinan nasional (Presiden Soeharto). Mahasiswa menolak Soeharto sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya.

Reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa ini cukup keras, baik melalui instrument fisik maupun kebijakan. Pada tanggal 21 Januari 1978 Laksamana Soedomo melalui Surat Keputusan Pangkopkamtib bernomor SKEP/02/KOPKAMTIB/I/1978 membekukan kegiatan seluruh Dema universitas/perguruan tinggi/institut. Tindakan pemerintah selanjutnya terhadap kampus diserahkan dari Kaskopkamtib Soedomo kepada Menteri P dan K yang baru Daoed Joesoef, menggantikan Sjaref Thayeb. Dalam kesempatan itu pula, Daoed Joesoef segera mengeluarkan SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang secara resmi diberlakukan tanggal 19 April 1978. Isi kebijakan ini melarang mahasiswa berpolitik praktis di dalam kampus.

2.1.4 Gerakan Mahasiswa Pasca 1978

Dampak dari pemberlakuan NKK/BKK membuat aksi-aksi mahasiswa relatif sepi hingga beberapa tahun. Namun sejak 1986 – 1990an, serangkaian demonstrasi mahasiswa secara sporadis masih

terdengar. Tuntutannya tidak sekadar penolakan NKK/BKK, tetapi sudah melebar pada permasalahan lain seperti ketidakberesan kampus, penggusuran, serta masalah-masalah kerakyatan lainnya.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pasca pemberlakuan NKK/BKK, banyak bermunculan gerakan mahasiswa yang sporadis, mengangkat isu-isu lokal, dan sebagian besar mereka mengambil aktivitas yang dinilai relatif aman dari tindakan represif pemerintah maupun pimpinan kampus. Mahasiswa kemudian menyalurkan aktivitas mereka melalui beberapa kegiatan, di antaranya:

Pertama, Kelompok Studi (KS). KS memiliki beberapa fungsi yang penting bagi gerakan mahasiswa pasca NKK/BKK. Melalui kegiatan-kegiatan diskusi dalam KS tersebut mahasiswa melatih kemampuan kritis terhadap masalah-masalah sosial politik. Selain itu, KS berperan sebagai salah satu pusat penyebaran informasi kritis antarmahasiswa. Di antara KS yang muncul pada awal tahun 1980-an ini yaitu Kelompok Studi Proklamasi, Lingkaran Studi Indonesia, dan Kelompok Studi Relata (Jakarta), Kelompok studi Fokal dan Kelompok Studi Dago Pojok (Bandung), Kelompok Studi Dasakung, Kelompok Studi Lingkungan, dan Forum Studi Sosial Demokrasi (Yogyakarta), Kelompok Studi Indonesia Raya, Kelompok Studi Wawasan Nusantara, dan Kelompok Studi Bulukunyi (Ujung Pandang).³³

Kedua, pers mahasiswa. Dalam konteks NKK, pers mahasiswa harus menginduk ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sebab itu *content analysis* tiap terbitan dengan mudah disensor rektorat. Pada masa awal NKK, tercatat hanya tiga kampus yang membebaskan pers mahasiswa untuk tidak menginduk kepada UKM, yaitu Pers Universitas Indonesia (*Salemba*) di masa rektor Prof. Dr. Mahar Mardjono, pers UGM (*Gelora Mahasiswa*) di masa rektor Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo, serta pers ITB (*Kampus*) di masa rektor Prof Dr. Iskandar Alisyahbana.³⁴

³³ Adi Suryadi Culla, *op.cit.*, hlm. 127 – 128.

³⁴ Didik Supriyanto, *op.cit.*, hlm. 78

Ketiga, Komite-komite Aksi (KA) seperti Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung (BKMB), Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ), Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan Kedungombo (KSKPKO), Kelompok Mahasiswa Jakarta (KMJ).³⁵ Komite-komite ini dalam kegiatannya terju langsung di tengah masyarakat untuk mengadvokasi masalah-masalah seperti penggusuran, korupsi, dan kenaikan tarif listrik.

2.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Lembaga Kemahasiswaan

Reaksi pemerintah terhadap aksi-aksi mahasiswa yang dinilai semakin radikal terutama pasca Peristiwa Malari 1974, mulai lebih represif. Tindakan pemerintah itu di antaranya dengan mendatangi kampus-kampus oleh militer untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh aktivis mahasiswa dan cendekiawan. Pemerintah juga memberi peringatan keras terhadap beberapa tokoh purnawirawan militer yang di antaranya A.H Nasution dan Kemal Idris, yang dianggap berpihak pada gerakan mahasiswa. Tindakan lain yang lebih keras yaitu dengan pembekuan Dema di seluruh perguruan tinggi, pembredelan pers mahasiswa, serta pemberlakuan NKK/BKK.

Menyangkut tindakan pemerintah terhadap dunia kemahasiswaan, ada tiga tindakan penting pemerintah yang secara khusus bertujuan untuk menata lembaga kemahasiswaan. Pertama, pembekuan organisasi Dema di seluruh perguruan tinggi dan penangkapan tokoh mahasiswa. Pembekuan ini disebabkan organisasi tersebut dianggap sebagai wadah yang paling efektif dalam menggalang kekuatan massa dan membahayakan stabilitas nasional. Kedua, pemberlakuan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) di bawah kontrol Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan yang kemudian dikenal dengan NKK/BKK ini meniadakan lembaga mahasiswa di tingkat universitas dan menjauhkan mereka dari aktivitas politik. Ketiga, pemberlakuan SK No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan yang menghidupkan kembali organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas.

³⁵ Lihat Irene H. Gayatri, "Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa", dalam Muridan Widjojo, *Penakluk Rezim Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999. 89-90.

2.2.1 Pembekuan Organisasi Dewan Mahasiswa (Dema)

Dema merupakan lembaga kemahasiswaan yang paling legendaris pada zamannya dan terbukti efektif menggalang kekuatan massa. Namun pada tanggal 21 Januari 1978, berdasarkan SK Pangkopkamtib Laksamana Soedomo Nomor: SKEP-02/KOPKAM/I/1978 yang ia tanda tangani mengumumkan mengenai “pembekuan kegiatan dewan-dewan mahasiswa universitas/perguruan tinggi/institut.”³⁶ SK Pangkopkamtib ini diikuti dengan instruksi Menteri P dan K Nomor I/U/1978 dan SK Menteri P dan K Nomor 037/U/1979 yang berisi pembubaran Dema dan pembatasan aktivitas mahasiswa. Mahasiswa hanya diizinkan beraktivitas seputar kesejahteraan, olah raga, dan persoalan akademik atau intelektual.³⁷

Pembekuan Dema beserta aktivitasnya menjadi pijakan awal pemerintah untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu penangkapan pimpinan mahasiswa. Dengan penangkapan pimpinan mahasiswa, maka reaksi-reaksi penentangannya akan bersifat personal dan tanpa diwadahi oleh lembaga resmi. Ketiadaan lembaga resmi akan melumpuhkan aktivitas mahasiswa, karena kekuatan aksi-aksi mahasiswa sangat didukung oleh berfungsinya lembaga *student government* yang berada dalam naungan Keluarga Mahasiswa atau Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM), seperti tercantum dalam AD/ART-nya.

Pasca pembekuan Dema, sejumlah tokoh mahasiswa ditangkap. Di antara tokoh-tokoh mahasiswa yang ditangkap yaitu Dodi Ch. Suriadiredja, Lukman Hakim, dan Indra K. Budenani dari UI (Jakarta). Lalu Hery Achmadi, Sukmadi Indro Cahyono, Iskandar Chotob, Lala Mustafa, Al-Hilal, Aa Tarsono (Bandung), M. Shaleh dan HARun Al Rasyid (Surabaya), dan Magdir Ismail (Yogyakarta).³⁸ Sementara itu, dalam pernyataan resminya Syarif Thayeb mengatakan mahasiswa yang ditahan dari seluruh Indonesia meliputi kurang lebih 70 orang pimpinan mahasiswa. Laksamana Soedomo sendiri menjelaskan mengenai sebab-

³⁶ Lihat Hariyadhie, *op.cit.*, hlm. 91 - 122

³⁷ Academic Freedom in Indonesia, “Dismantling soeharto-Era Barriers”, dalam situs www.hrw.org. Diakses pada 12 Agustus 2008.

³⁸ Adi Suryadi Cula, *op.cit.*, hlm. 113

sebab penangkapan tersebut. Soedomo juga mengatakan bahwa aksi-aksi mereka yang jelas-jelas terbukti akan diadili, sedangkan mereka yang tidak terlibat akan dibebaskan.³⁹

Beberapa tokoh mahasiswa yang ditangkap tersebut kemudian diadili. Misalnya di Medan, pengadilan dijalani oleh sejumlah fungsionaris Dema USU. Di Surabaya, Harun Al Rasyd dan Muhammad Soleh dari Dema ITS diadili bertepatan dengan pengadilan di Medan. Di Bandung, persidangan Heri Achmadi (Ketua Umum Dema ITB), Iskadir Chottob, Indro Tjahyono, dan lain-lainnya dilakukan tanggal 31 Januari 1979. Di Jakarta, pengadilan serupa menimpa Lukman Hakim (Ketua Dema UI) dan sejumlah wakil ketua Dema UI. Pengadilan dengan tuntutan yang sama, yaitu penghinaan kepada Kepala Negara, juga terjadi di Yogyakarta, Semarang, dan Ujung Pandang. Mereka tidak dikenakan tuntutan subversif seperti yang terjadi pada mahasiswa yang dianggap terlibat dalam Peristiwa Malari 1974.⁴⁰

Selain penangkapan atas tokoh-tokoh mahasiswa, sepanjang tahun 1977 – 1978, pemerintah melakukan tindakan represif terhadap sejumlah tokoh kritis lainnya. Beberapa cendekiawan dan tokoh militer purnawirawan yang kritis diberikan ancaman peringatan. Di antaranya, Prof. Dr. Ismail Sunny, seorang dosen UI dan pakar Hukum Tata Negara, ditangkap karena bersuara vokal mendukung gerakan protes mahasiswa. Di samping itu, sejumlah tokoh militer purnawirawan juga mendapat peringatan karena suara mereka yang kritis dan dinilai anti-Soeharto, antara lain Jenderal (purn) A.H. Nasution, Ali Sadikin, H.R. Dharsono, dan Kemal Idris.⁴¹ Selain penangkapan tokoh kritis, pemerintah juga melakukan pembredelan terhadap media massa (koran) yang dinilai tidak seimbang dalam menyiarkan kegiatan mahasiswa. Koran yang dilarang terbit itu di antaranya *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *Indonesia Times*, *Sinar Pagi*, dan *Pos Sore*.⁴²

³⁹ Hariyahdie, *op.cit.*, hlm. 91

⁴⁰ *Tempo*, 10 Februari 1979.

⁴¹ Lihat Hariyahdie, *op.cit.*, hlm. 113 – 132.

⁴² Arbi Sanit, "Gerakan Mahasiswa 1970 – 1973: Pecahnya Bulan Madu Politik", dalam Muridan S. Widjodjo, *op.cit.*, hlm. 58

2.2.2 Pemberlakuan Kebijakan NKK/BKK

Tindakan pemerintah dalam pembekuan Dema ini diikuti dengan pemberlakuan kebijakan NKK/BKK di seluruh perguruan tinggi. Pada satu sisi, kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) secara parsial dapat dikatakan sebagai reaksi pemerintah atas gerakan mahasiswa 1978 yang mempersoalkan eksistensi Soeharto. Pada sisi lain, NKK masuk ke dalam wacana ideologi pembangunan Orde Baru atau tepatnya berposisi sebagai instrumen pengontrol daya protes gerakan sosial mahasiswa. NKK menjadi salah satu dari sekian banyak instrument politik lain seperti Paket 5 UU Politik 1985 guna menjamin stabilitas politik nasional dan posisi presiden.

Di bawah konsep NKK, mahasiswa tidak diperkenankan membentuk organisasi kemahasiswaan (*student government*) sebagai sarana penggalangan solidaritas dan mobilisasi massa dalam melakukan aksi-aksi protes terhadap pemerintah. Kebijakan ini membuat mahasiswa hanya boleh melakukan kegiatan di dalam kampus dan dilarang berhubungan dengan kehidupan politik praktis.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan NKK diawali dengan pembekuan Dema-Dema seluruh Indonesia oleh Pangkoptambik Soedomo (pengganti Soemitro). Keputusan pembekuan Dema ini kemudian diikuti keluarnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). SK ini diberlakukan oleh Menteri P&K Daoed Joesoef mulai tanggal 19 April 1978. SK tersebut memutuskan:

- Pertama : Menugaskan kepada para rektor sebagai penanggung jawab tertinggi dalam kampus untuk melaksanakan normalisasi kehidupan kampus tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidato pengarahannya pada Rapat Kerja Rektor tanggal 14 dan 15 April 1978.
- Kedua : Yang dimaksudkan dengan normalisasi kehidupan kampus adalah redefinisi dan penataan kembali kehidupan kampus secara mendasar, fungsional, dan bertahap.

- Ketiga : Oleh karena keadaan di berbagai perguruan tinggi berbeda-beda, maka para Rektor diberi kesempatan untuk mengadakan persiapannya mulai tanggal 17 April 1978 sampai tanggal 14 Mei 1978.
- Keempat : Para rektor wajib member laporan tentang perkembangan usaha persiapan seperti tersebut pada pasal “ketiga” dan pelaksanaan seperti tersebut pada pasal “pertama” keputusan ini kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.⁴³

SK ini merupakan pedoman normatif bagi penataan kampus yang selama ini oleh Daoed Joesoef disebut sebagai arena politik praktis. Menurut Daoed Joesoef, sesuai fungsi universitas yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian maka universitas bertugas mencetak pekerja otak (*knowledge worker*) yang diperlukan bagi teknostruktur. Daoed Joesoef membagi politik dalam tiga pengertian. Pertama, politik dalam arti konsep. Kedua, politik dalam arti kebijakan (*policy*). Ketiga, arena percaturan (*politics*). Berdasarkan ketiga pengertian ini Daoed Joesoef menulis:

Apabila mahasiswa bergerak dalam artian pertama, artinya ia melaksanakan hak politiknya sesuai hakikat kemahasiswaannya.... Apabila dia “berpolitik” dalam bentuk “aksi dan kebijakan” (politik dalam pengertian kedua), dia sebenarnya melakukan suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan hakikat kemahasiswaannya dan tidak pantas memakai predikat mahasiswa. Aksi-aksi beginilah yang telah mengubah kampus dari dunia berpikir menjadi satu arena politik (politik dalam artian ketiga), mengubah dunia mahasiswa menjadi dunia sindikat.⁴⁴

Kebijakan NKK yang tidak menghendaki aktivitas politik mahasiswa tersebut kemudian dipertegas dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada NKK. Kebijakan-kebijakan itu antara lain SK Menteri No.

⁴³ Salinan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/U/1978 tentang “Normalisasi Kehidupan Kampus”, 19 april 1978. Sumber: Arsip Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional RI.

⁴⁴ Lihat Didik Supriyanto, *op.cit.*, hlm. 39.

037/U/1978 tentang Bentuk Penataan Kembali Kehidupan Kampus dan Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

SK No.037/U/1978 ini secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa (organisasi mahasiswa tingkat universitas) dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas, yakni Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Sesuai dengan NKK, SMF sebagai lembaga eksekutif kegiatannya dibatasi dalam tiga bidang: (1) bidang kesejahteraan mahasiswa; (2) bidang minat mahasiswa (kegemaran seperti olah raga dan kesenian); dan (3) bidang pengembangan penalaran mahasiswa. Hal yang paling penting bahwa SK ini adalah pemberian kekuasaan kepada rektor dan pembantu rektor untuk menentukan kegiatan mahasiswa, sebagaimana bunyi SK tersebut:

Lembaga-lembaga kemahasiswaan yang didasarkan pada ketiga jenis kebutuhan mahasiswa itu, tanggung jawab mengenai pembentukan, pengarahan, dan perkembangannya berada di tangan Rektor Universitas c.q. Pembantu Rektor III (Urusan Kemahasiswaan).⁴⁵

Konsep NKK juga berlanjut dengan keluarnya Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. D. A Tisna Amidjaya, No. 002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Kembali Lembaga-lembaga Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peraturan ini merupakan penjelasan teknis lebih lanjut terhadap pelaksanaan NKK. Instruksi ini sering disebut dengan instruksi BKK, karena di dalamnya memuat ketentuan dibentuknya Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Badan inilah bertugas mengawasi jalannya kegiatan mahasiswa. Instruksi Dirjen itu berbunyi:

1. Di tingkat Universitas/Institut dibentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang diketuai oleh Pembantu Rektor III dan beranggotakan para Pembantu Dekan III, serta staf ahli yang terdiri dari

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 40

Dosen-dosen pembimbing, serta tokoh-tokoh mahasiswa yang dianggap mengetahui seleuk-beluk masalah kemahasiswaan di perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. BKK membentuk Unit-unit kegiatan mahasiswa dalam bidang-bidang kesejahteraan mahasiswa, minat dan perhatian mahasiswa serta penalaran mahasiswa.
3. Ketua, sekretaris dan para anggota BKK diangkat oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.
4. Ketua dan Sekretaris Unit-unit kegiatan mahasiswa diangkat oleh Ketua BKK dengan persetujuan Rektor.
5. Team Pendamping:
 - a. Di tingkat Fakultas dibentuk Team Pendamping atau BKK tingkat fakultas yang diketuai oleh PD III dan beranggotakan para Ketua Jurusan dan tokoh-tokoh mahasiswa.
 - b. Team Pendamping bertugas memberikan nasehat dan saran-saran kepada Dekan yang berkaitan dengan kegiatan BPM dan SM.⁴⁶

Dari ketentuan-ketentuan tersebut tampak bahwa kewenangan rektor dan pembantu rektor sangat besar dalam menentukan kegiatan mahasiswa, bahkan mereka juga berhak sepenuhnya untuk memilih mahasiswa-mahasiswa tertentu sebagai pemimpin mahasiswa. Ketentuan itu juga tidak hanya berlaku di tingkat universitas tetapi juga berlaku di tingkat fakultas yang memberi kuasa penuh pada Dekan dan Pembantu Dekan III. Pemerintah banyak menyerahkan tindakan pengamanan dan pengawasan aktivitas mahasiswa kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta pimpinan kampus.

Kontroversi terhadap pemberlakuan NKK/BKK pun mulai bermunculan. Di tingkat mahasiswa sendiri tidak semuanya menolak meskipun tidak sebesar yang menolaknya. Aksi penolakan itu sampai berlanjut ke DPR. Reaksi pertama yang mengajukan protes kepada DPR, dimulai oleh tiga orang mahasiswa ITB yang mewakili 12 perguruan tinggi se-Bandung, pada 18 Desember 1978.⁴⁷ Sejak saat itu, DM UI

⁴⁶ Salinan Instruksi Dirjen Pendidikan Tinggi No.002/DJ/Ins/1978, tanggal 17 Mei 1978. Sumber: Arsip Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikiti) Departemen Pendidikan Nasional RI.

⁴⁷ *Kompas*, 19 Januari 1979

bersama-sama DM se-Indonesia beberapa kali mendatangi DPR untuk melakukan protes.

Meskipun penolakan NKK/BKK sampai pada jenjang terakhir legislatif yang mewakili suara rakyat Indonesia itu ditolak, protes-protes sebagian mahasiswa di beberapa perguruan tinggi yang menolak pelaksanaan NKK/BKK masih berlangsung. Akan tetapi, protes-protes mahasiswa ini tanpa pengorganisasian yang baik, sporadis, dan tidak ada wadah pemersatu karena Dewan Mahasiswa sebagai organisasi pemersatu sudah tidak ada lagi bersamaan dengan ditahannya para pengurusnya.

Sebagai suatu kebijakan pemerintah yang baru, NKK/BKK sangat berpengaruh terhadap dinamika kemahasiswaan atau lebih khusus lagi berpengaruh terhadap perubahan format baru gerakan mahasiswa. Perubahan ini merupakan adaptasi mahasiswa dalam merespon kebijakan pemerintah yang berpengaruh cukup besar. Mahasiswa yang tidak puas dengan organisasi dari kebijakan NKK/BKK tersebut kemudian beraktivitas di luar organisasi tersebut. Minat dan bakat mereka disalurkan melalui beberapa lembaga yaitu Kelompok Studi, Pers Mahasiswa, dan Komite Aksi atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara itu di kalangan organisasi intra-universitas, mahasiswa menyatukan diri dalam forum-forum komunikasi antar-SM dan BPFM.

Namun memasuki tahun 1990, kebijakan NKK/BKK dicabut dan kemudian digantikan dengan SK No. 0457/U/1990 yang dikeluarkan oleh Mendikbud Fuad Hasan. Inti dari SK ini di antaranya pemerintah akan menghidupkan kembali lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas, yaitu Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT). Pemerintah melalui Mendikbud Fuad Hasan pada saat itu ingin mewadahi aktivitas mahasiswa yang dinilainya mengalami kevakuman selama masa NKK/BKK, namun dengan satu syarat mahasiswa jangan lagi menginginkan Dema.⁴⁸

⁴⁸ Keterangan ini disampaikan oleh Merdias Almatsier (Purek III UI) pada 16 Maret 2009 dan Enoch Markum (Direktur Kemahasiswaan Dikti Departemen P dan K) pada 12 Maret 2009.

2.2.3 Pemberlakuan Kebijakan SMPT (SK No. 0457/1990)

Pada tanggal 28 Juli 1990, Menteri P dan K mengeluarkan keputusan No. 0457/U/1990, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Di kalangan mahasiswa UI, keputusan tersebut dikenal dengan nama SK 0457. Dalam keputusan itu antara lain ditetapkan pada pasal 2 bahwa “organisasi kemahasiswaan (a) di tingkat perguruan tinggi terdiri dari: Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), sedangkan (b) di tingkat fakultas pada suatu universitas/institut, organisasi kemahasiswaan dapat terdiri dari: Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF), Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).”⁴⁹

Di dalam ketentuan itu juga disebutkan bahwa anggota SMPT adalah ketua-ketua SMF, BPMF, dan UKM. Sedangkan kepengurusan SMPT disebutkan terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan komisi-komisi. Komposisi tersebut kemudian dengan tegas digarisbawahi oleh pasal 3 bahwa SMPT adalah lembaga forum. SMPT berkedudukan di tingkat perguruan tinggi dan memiliki fungsi di antaranya mewakili mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK).

Selanjutnya, pada pasal 17 ketentuan itu menetapkan bahwa Keputusan Menteri P dan K yang tersebut di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi:⁵⁰

- 1) No. 0156/U/1978 tanggal 19 April 1978, tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK);
- 2) No. 037/U/1979 tanggal 24 Februari 1979, tentang Bentuk Susunan Lembaga Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan

⁴⁹ Somadikarta, Tri Wahyuning M. Irsyam, dan Boen S. Oemarjadi. *Tahun Emas Universitas Indonesia jilid I: dari Balai ke Universitas*. Jakarta: UI Press, 2000., hlm. 204.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 204

- 3) No. 0230/U/1980 tanggal 24 September 1980, tentang Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Universitas/Institut Negeri (BKK).

Alasan pemerintah mengeluarkan SK 0457 pada saat itu, yakni untuk memberikan akomodasi terhadap mahasiswa yang selalu menuntut dihidupkannya kembali Dema. Pemerintah melalui Menteri P dan K Fuad Hasan mempersilahkan mahasiswa terus bergerak, tetapi jangan menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya, pemerintah menawarkan konsep SMPT dengan memposisikan mahasiswa sebagai mitra pimpinan universitas dan bukan berdiri sendiri seperti Dema. Ada semacam kekhawatiran pemerintah jika mahasiswa dibiarkan terus menuntut Dema, karena bisa saja akan terjadi konsolidasi di antara mereka yang mengancam pemerintah.⁵¹

Bagaimanapun pemerintah masih "trauma" dengan sepak terjang Dema yang mampu melakukan mobilsasi sosial bahkan pernah menurunkan pemerintahan yang berkuasa. Dengan alasan itu, menghidupkan organisasi tingkat universitas pengganti Dema merupakan solusi yang paling memungkinkan yang diambil pemerintah.⁵²

Namun demikian, meskipun lembaga kemahasiswaan dihidupkan kembali pada tingkat universitas, tetapi kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang besar, yaitu UI, UGM, dan ITB, perdebatan yang hebat berkembang di antara mahasiswa. Mayoritas mahasiswa ITB menolak kebijakan tersebut, sedangkan di UGM terjadi polarisasi. Bagi mahasiswa yang menerima penerapan SMPT, walaupun mereka mengakui SMPT memiliki sejumlah kelemahan tetapi dibandingkan organisasi sebelumnya dianggap lebih demokratis. Sementara mahasiswa yang menolak penerapan SMPT beranggapan bahwa SMPT hanya sebagai agenda

⁵¹ Wawancara Enoch Markum (Direktur Kemahasiswaan Dikti Departemen P dan K RI), pada 12 Maret 2009. Menurut keterangan Encoch, Penghidupan kembali organisasi tingkat universitas melalui SK 0457 ini memang telah mendapat restu dari Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto mewanti-wanti satu hal kepada Menteri P dan K Fuad Hasan, "organisasi tingkat universitas boleh dihidupkan kembali dengan catatan asal organisasi itu tidak menggunakan nama Dema".

⁵² *Ibid*

terselubung pemerintah untuk menarik kembali ke kampus dan mencegah kemungkinan terjadinya aliansi mahasiswa dengan kekuatan lain di luar kampus.⁵³

Di UI sendiri SK 0457 awalnya sempat ditolak oleh mahasiswa melalui pernyataan bersama dari Forum Komunikasi (Forkom)⁵⁴ SM-BPMF. Namun setelah melalui berbagai pembahasan dan koreksi yang dilakukan Forkom selama hampir dua tahun (Agustus 1990 – Oktober 1991) serta adanya kesepakatan dengan Purek III yang mewakili pejabat rektorat, SMPT akhirnya dapat diterima.⁵⁵

Setelah mengalami beberapa kali kebijakan penataan lembaga kemahasiswaan, tampaknya tujuan pemerintah untuk menjauhkan Dema dari tuntutan mahasiswa telah berhasil. Pasca pembekuan Dema, aktivitas politik praktis mahasiswa seperti aksi-aksi unjuk rasa juga relatif sepi. Pemerintah pada saat itu memberikan wadah penyaluran kegiatan mahasiswa ke dalam empat bidang, yaitu bidang kesejahteraan mahasiswa, minat dan bakat, penalaran, dan pengabdian masyarakat.

⁵³ Adi Suryadi Culla, *op.cit.*, hlm. 134 – 135.

⁵⁴ Forkom UI merupakan wadah komunikasi dan perkumpulan para ketua lembaga kemahasiswaan antar-fakultas (SM-BPM fakultas) sebagai lembaga informal pemersatu di tingkat universitas yang dibentuk pada tahun 1986. Keterangan lebih lanjut mengenai Forkom UI dapat dilihat di bab III dan IV pada tulisan ini.

⁵⁵ Lihat “Kronologis Terbentuknya SM UI” dalam *Majalah Suara Mahasiswa UI*, Edisi Perdana Juni 1992, hlm. 9.